

**JURNAL**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN**  
**DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI UTARA**

Dr. Ir. Benu Olfie L. Suzana,MS.  
 Dr. Ir. Gene H. M. Kapantow, MIKomp, MSc.

VREDRICH BANTIKA

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil regresi linier berganda memberikan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 92,3 %. dengan peubah bebasnya adalah jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dari tiga peubah bebas, ternyata hanya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh nyata terhadap indeks gini. Dilihat dari arah pengaruhnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan indeks gini sedangkan penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks gini di Sulawesi Utara.

*Kata Kunci : Distribusi Pendapatan*

**ABSTRACT**

This study aimed to analyze whether the population, agricultural land area and economic growth affected the inequality of income distribution in North Sulawesi.

Results of the multiple linear regression analysis gave the coefficient of determination ( $R^2$ ) of 92.3 %.

which included population, land area of agriculture and economic growth as independent variables.

Furthermore, from the three independent variables, only population and economic growth gave significant effect to the Gini Ratio. Judging from the direction of the impact, an increase in economic growth would lower the Gini Ratio, while an increase in the population would also increase the Gini Ratio in North Sulawesi.

*keywords : Income Distribution*

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 2006).

Sektor pertanian merupakan sektor yang berpengaruh dan potensial bagi perekonomian untuk peningkatan distribusi pendapatan di Indonesia, oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diterapkan harus dapat mendorong pertanian agar dapat lebih produktif dan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian daerah agar membantu mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Besarnya investasi yang harus dialokasikan diharapkan mampu menjadikan sektor ini sebagai pendorong dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Lenggogeni, 2012).

Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan

ekonomi. (Suryono,2000). Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau

jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001).

Koefisien gini (*Gini Ratio*) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidaserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan (BPS SULUT, 2014).

Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar. Hal ini lah berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan. Salah

satu faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Saharan Afrika adalah peningkatan populasi penduduk (Fulgsang, 2013).

Lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil dan pendapatan petani. Makin luas lahan yang diusahakan maka makin besar pula kemungkinan petani tersebut untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, namun sebaliknya makin sempit lahan yang diusahakan maka makin kecil pula kemungkinan petani untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, perbedaan tingkat penguasaan lahan dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu kelompok masyarakat pertanian (Jannah, 2012).

Pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi Negara

yang sedang berkembang. Pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan oleh peranan sektor pertanian yang dominan. Selanjutnya dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, peranan sektor industri dan jasa semakin besar dan sebaliknya peranan sektor pertanian menurun. Simon Kuznets (1955) dalam (Todaro, 2006) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik.

Perkembangan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan adanya pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya yang tersedia untuk merangsang perkembangan kegiatan pembangunan ekonomi serta

memperlancar pertumbuhan ekonomi dalam daerahnya yang tujuannya mengurangi disparitas pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara. Namun pada kenyataannya, potensi dan kekayaan alam yang ada di masing-masing daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki keragaman yang menyebabkan terjadinya kesenjangan serta berdampak pada disparitas pembangunan ekonomi Sulawesi Utara (Rumagit, 2014).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya muncul pertanyaan yaitu: apakah jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Gini di Sulawesi Utara.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah

jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Gini di Provinsi Sulawesi Utara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Kiranya hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi semua orang dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya mensinergikan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Jumlah Penduduk**

Populasi penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan

akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar. Hal ini lah berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Saharan Afrika adalah peningkatan populasi penduduk (Fulgsang, 2013).

Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan di-pengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya

ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000).

Selain itu juga partisipasi penduduk dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan pembangunan ekonomi sehingga proses pembangunan dalam suatu daerah dapat dicapai sesuai sasaran (Murty, 2000).

Antara pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan kependudukan nasional terdapat pengaruh timbal balik atau mempengaruhi satu sama lainnya. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional diperlukan sejumlah sumberdaya penduduk yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain jumlah penduduk juga distribusi

penduduk yang serasi diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional secara lebih mantap dan terarah. Kemajuan pembangunan ekonomi nasional diukur dari hasil produksi menurut sektor dan pembangunan kependudukan nasional dilihat dari jumlah penduduk menurut wilayah dicerminkan oleh alokasi ekonomi berbagai wilayah dan kapasitas penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor (Adisasmita, 2005).

## **2.2. Luas Lahan Pertanian**

Lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil dan pendapatan petani. Makin luas lahan yang diusahakan maka makin besar pula kemungkinan petani tersebut untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, namun sebaliknya makin

sempit lahan yang diusahakan maka makin kecil pula kemungkinan petani untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, perbedaan tingkat penguasaan lahan dapat menyebabkanketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu kelompok masyarakat pertanian (Jannah, 2012).

Pada decade 70-an dan awal 80-an beberapa studi mengatakan bahwa kesenjangan pada distribusi pendapatan merupakan akibat dari distribusi penguasaan lahan yang timpang setelah masuknya teknologi baru Soentoro (1981)*dalam*(Sabrina, 2011). Menurut Schrevel (1989)*dalam*(Adnyana, 2000) menyatakan bahwa distribusi lahan yang timpang tidak mengakibatkan distribusi pendapatan yang timpang pula. hal ini disebabkan semakin dominannya peranan sektor non

pertanian dalam memberikan kontribusi pendapatan.

Luas lahan usahatani akan menentukan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan rumah tangga. Sehingga luas lahan akan mempengaruhi pendapatan yang diterima petani karena pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama bagi petani. Sejalan dengan itu peranan lahan pertanian juga penting. Dengan asumsi bahwa semua peubah lain tetap, semakin tinggi derajat ketidakmerataan penguasaan lahan pertanian semakin tinggi derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang berasal dari sektor pertanian. Sedangkan keeratan hubungan antara distribusi penguasaan lahan pertanian dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan juga menunjukkan nilai koefisien korelasi yang tinggi (Hernanto, 2003).

Konversi lahan pertanian merupakan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan nasional karena dampaknya bersifat permanen. Lahan pertanian yang telah dikonversi ke penggunaan lain di luar pertanian sangat kecil peluangnya untuk berubah kembali menjadi lahan pertanian. Keberadaan lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat luas secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu hilangnya lahan pertanian akibat dikonversi ke perkebunan atau non pertanian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek pembangunan. Salah satu dampak konversi lahan yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah terganggunya ketahanan pangan yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional (Irawan, 2005).

Terdapat dua pola utama yang mencirikan struktur dan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan:

1. Ada hubungan searah antara distribusi pendapatan dengan penguasaan lahan pertanian, Pola ini umumnya dikenal pada masyarakat agraris di mana sumberdaya lahan (*land base agriculture*) memegang peranan sangat dominan dalam menciptakan arus masuk pendapatan masyarakat pedesaan, Dengan kata lain, ketimpangan maupun pemerataan distribusi pendapatan dapat dijelaskan atau terefleksikan pada ketimpangan maupun pemerataan distribusi penguasaan lahan ataupun penggarapan lahan pertanian.
2. Ada hubungan terbalik antara konsentrasi pendapatan dengan konsentrasi penguasaan lahan.

Kegiatan atau usaha-usaha non-pertanian atau usaha *non land base agriculture* dilihat sebagai alternative sumber pendapatan rumahtangga pedesaan. Usaha tersebut dapat memberikan bias negative maupun positif terhadap distribusi masyarakat pedesaan. Bias negatif apabila kehadiran usaha *non land base agriculture* sebagai sumber kegiatan menghasilkan arus pendapatan yang justru memperburuk distribusi pendapatan dan sebaliknya untuk bias positif (Rachman, 2002).

Meningkatnya jumlah tenaga kerja di pedesaan dan tekanan penduduk terhadap lahan yang diikuti dengan luas lahan yang semakin menyusut (Nasucha, 2000) akan mengakibatkan rata-rata luas

kepemilikan dan garapan lahan di Jawa semakin sempit.

### 2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi karena dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan perkapitanya terus-menerus meningkat sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan perkapita (Sukirno, 2006).

Pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003).

Simon Kuznets (1955) dalam (Todaro, 2006) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik.

Ravalion dan Chen (1997) dalam (Waluyo, 2006) menemukan hubungan yang signifikan dan berkorelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan kesenjangan. Hasil riset ini memberikan petunjuk bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kesenjangan pendapatan, daripada memberikan kontribusi atas kenaikan kesenjangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Perhitungan pendapatan daerah awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2005).

Pertumbuhan ekonomi yang berlaku belum tentu menghasilkan pembangunan ekonomi dan peningkatan dalam kesejahteraan (pendapatan) masyarakat, hal ini disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi

tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan perkapita) akan mengalami penurunan. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan (Sukirno, 2006).

#### **2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu (Astuti, 2015).

Ketimpangan harus mendapat perhatian karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat (Todaro, 2006).

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2006).

Alesina dan Rodrik (1994) dalam (Hajiji, 2010) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan

menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal.

Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi Ismoro (1995) dalam (Rahayu, 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan

proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktifitas.
2. Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan. Sayangnya relevansi teori fungsional tidak mempengaruhi pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar pasar (faktor-faktor non-ekonomis) misalnya kekuatan dalam menentukan faktor-faktor harga (Todaro, 2003).

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi

pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, dan juga selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan yang lalu (Putra, 2011).

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar (Retnosari, 2006).

## 2.5. Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini Ratio pertama kali dikemukakan oleh C.GINI pada tahun 1914 yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan (Putra, 2011).

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{P_i = (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

G adalah indeks gini,  $P_i$  adalah persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke- $i$ ,  $Q_i$  adalah persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas- $i$ ,  $Q_{i-1}$  adalah persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke- $i$  dan  $n$  adalah banyaknya kelas pendapatan, 10.000 = Bilangan Konstan.

Koefisien gini (*Gini Ratio*) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidaserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Hal ini ditetapkan sebagai rasio dengan nilai antara 0 dan 1, koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. 0 berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis) dan 1 berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain

memiliki pendapatan nol) (BPS SULUT, 2014).

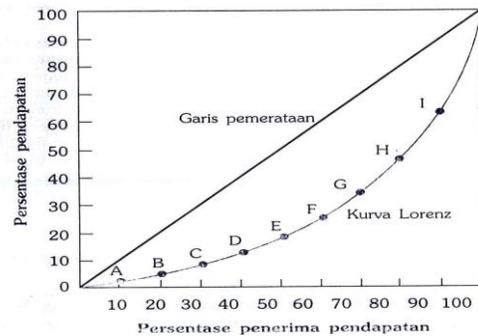
**Tabel 1. Indikator Ketimpangan Indeks Gini**

Nilai Indeks Gini	Tingkat Ketimpangan
Lebih kecil dari 0,4	Rendah
Antara 0,4-0,5	Sedang
Lebih besar dari 0,5	Tinggi

Sumber : BPS SULUT, 2014

Para ekonom umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang (biasanya menggunakan metode Kurva Lorenz dan Koefisien Gini): dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi, yang indikatornya berfokus pada bagian dari pendapatan nasional

yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (Todaro, 2004).



Gambar 1. Kurva Lorenz

Sumber : Putra, 2011

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatannasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. KurvaLorenz yang semakin dekat ke diagonal

(semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Putra, 2011).

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Retnosari (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat” penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisa pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 1992-2004. Kedua, menganalisa pengaruh

variabel lain terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 1992-2004.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika. Untuk meramalkan bagaimana pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel endogen digunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Dengan metode tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data *timeseries* periode observasi tahun 1992 hingga tahun 2004. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, dan Bank Indonesia.

Dengan menggunakan taraf nyata sepuluh persen ( $\alpha=10\%$ ), hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan populasi Jawa

Barat berpengaruh negatif yang signifikan, investasi dalam negeri periode sebelumnya berpengaruh positif yang signifikan, investasi luar negeri periode sebelumnya berpengaruh negatif yang tidak signifikan, pengeluaran pemerintah Jawa Barat berpengaruh positif yang signifikan, ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Jawa Barat berpengaruh positif yang signifikan, *dummy* otonomi daerah berpengaruh positif yang signifikan, dan *dummy* krisis ekonomi berpengaruh negatif yang signifikan.

Dari temuan empiris yang didapatkan dalam penelitian ini terlihat adanya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin

meningkat, dan sebaliknya semakin rendah distribusi pendapatan maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin rendah.

Pangemanan (2001) melakukan penelitian yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan di Indonesia dengan Menggunakan Data Tahun 1980-1996 untuk 26 Propinsi Di Indonesia". Variabel terikat yang digunakan sebagai ukuran distribusi pendapatan adalah Indeks Gini, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas, proporsi anggota rumah tangga terdidik, proporsi jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor industri, pertumbuhan pendapatan nasional dan distribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Estimasi yang digunakan adalah metode GLS dengan

menggunakan *fixed effect*, dengan hasil sebagai berikut:

1. Kenaikan penduduk usia 60 tahun ke atas secara signifikan menurunkan distribusi pendapatan, karena penduduk usia lanjut mayoritas berada pada kelompok rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas.
2. Kenaikan proporsi penduduk yang bekerja dan terdidik akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga, karena ketidakmerataan distribusi pendidikan.
3. Kenaikan proporsi anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga, karena adanya kesenjangan tingkat upah yang cukup tinggi antar pekerja yang bekerja di sektor industri pengolahan, dimana sebagian kecil pekerja bekerja sebagai manajer, teknisi, dan atau yang memiliki keahlian tinggi.
4. Kenaikan pertumbuhan ekonomi menurunkan distribusi pendapatan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori Kuznets yang menyatakan bahwa pada awal tahap pembangunan, distribusi pendapatan akan meningkat seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pada tingkatan pertumbuhan tertentu, distribusi pendapatan akan semakin menurun walaupun pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Sutarno (2003) melakukan penelitian yang berjudul "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000".

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi dan memahami kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas. Alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil serta trend dan Korelasi Pearson.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan Tipologi Klassen, Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu Kecamatan dengan pertumbuhan dan pendapatan tinggi, pendapatan tinggi tetapi pertumbuhan rendah, pertumbuhan tinggi tetapi pendapatan rendah, dan pertumbuhan dan pendapatan rendah.

Berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Theil, ditemukan bahwa masih terdapat disparitas yang dilihat dari PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten

Banyumas antara periode tahun 1993-2000. Yang lebih penting, ternyata Hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Banyumas. Dan yang terakhir, ada hubungan yang negatif antara Indeks Williamson dan Indeks Theil terhadap pertumbuhan PDRB.

Supriyati (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Struktur dan Distribusi Pendapatan Rumah tangga Petani Lahan Sawah di Jawa dan Luar Jawa” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji.

1. struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan (khususnya petani lahan sawah di lima kabupaten di Jawa dan dua kabupaten di luar Jawa).
2. distribusi pendapatan dan kaitannya dengan distribusi kepemilikan/penguasaan lahan.

3. merumuskan saran kebijakan untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga.

Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui metoda survei di lima kabupaten yang tersebar di tiga propinsi di Jawa dan dua kabupaten di Luar Jawa. Data bersumber dari penelitian kerjasama Puslitbang Sosek Pertanian dengan DAI/USAID. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Indramayu dan Majalengka (Jawa Barat), Klaten (Jawa Tengah), dan Ngawi dan Kediri (Jawa Timur) serta Kabupaten Agam (Sumatera Barat) dan Sidrap (Sulawesi Selatan).

Masing-masing kabupaten dipilih empat desa masing-masing merepresentasikan desa dengan luas lahan sawah dominan berdasar ketersediaan air irigasi yaitu desa lahan sawah irigasi

teknis (ketersediaan air baik), setengah teknis (ketersediaan air sedang), sederhana ketersediaan air kurang) dan lahan sawah tadah hujan. Di setiap desa diwawancara 20 petani lahan sawah yang dipilih secara acak dan mewakili buruh tani dan petani dengan penguasaan lahan sempit, sedang dan luas relatif terhadap populasi petani lahan sawah di masing-masing desa.

Waluyo (2006) melakukan Penelitian dengan judul “Hubungan antara Tingkat Distribusi Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara”. Dari hasil analisis dan pembahasan terhadap estimasi model regresi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan.

Artinya, setiap ada penurunan distribusi pendapatan, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka akan menurunkan distribusi pendapatan. Hal ini tidak sesuai dengan Hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, hubungan antara kesenjangan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, hubungan negatif akan terjadi dalam jangka panjang.

## **METEDOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan sejak persiapan hingga penyusunan laporan akhir penelitian. Kegiatan dimulai bulan Juli 2015 sampai dengan Oktober 2015. Lokasi penelitian yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

### **3.3. Konsep Pengukuran Variabel**

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini terdiri dari variabel tak bebas dan variabel bebas. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah indeks gini di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2013 dan variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari :

#### **1. Jumlah Penduduk Provinsi**

##### **Sulawesi Utara**

Jumlah penduduk di Provinsi

Sulawesi Utara tahun 2005-2013

(Juta Jiwa)

#### **2. Luas Lahan Pertanian Provinsi**

##### **Sulawesi Utara**

Luas lahan pertanian di Provinsi  
Sulawesi Utara tahun 2005-2013  
(Juta Ha)

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi  
Sulawesi Utara tahun 2005-2013  
(%)

#### 3.4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

##### a. Model Regresi

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \varepsilon_i$$

$Y_i$  adalah indeks gini di Sulawesi Utara,  $X_{1i}$  adalah Jumlah penduduk di

Sulawesi Utara (juta jiwa),  $X_{2i}$  adalah luas lahan pertanian di Sulawesi Utara (juta Ha),  $X_{3i}$  adalah pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (%).  $\beta_0$  adalah *intercept* atau konstanta,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  adalah koefisien regresi dan  $\varepsilon_i$  adalah error.

##### b. Uji Statistik

###### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat besarnya prosentase variasi (keragaman) variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas dalam model. Nilai koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur besarnya sumbangan atau kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas. (2) Nilai koefisien determinasi berkisar dari nol sampai satu. Semakin mendekati satu maka model dikatakan semakin baik

karena menunjukkan semakin tepat atau cocoknya suatu garis regresi serta semakin besar variasi variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel tak bebas.

## 2. Uji Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama sama/serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Mekanisme pengujian menggunakan hipotesis adalah sebagai berikut:

$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = 0$  , paling tidak ada satu variabel bebas yang tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas ( $b_i = 0$ ).

$H_1: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$  , paling tidak ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas ( $b_i \neq 0$ ).

## 3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut :

$H_0: b_i = 0$  , variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas.

$H_1: b_i \neq 0$  , variabel bebas berpengaruh nyata terhadap terhadap variabel tak bebas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Manado terletak antara  $00^{\circ}15'$  –  $05^{\circ}34'$  Lintang Utara dan antara  $123^{\circ}07'$  –  $127^{\circ}10'$  Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut

Pasifik disebelah Utara serta Laut Maluku di sebelah Timur. Batas sebelah Selatan dan Barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo.

Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 14.544,36 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 11 kabupaten dan empat kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 3.021,60 km<sup>2</sup> atau 20,78 % dari Wilayah Sulawesi Utara.

Di Sulawesi Utara terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah danau tercatat ada sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengalir di Wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai.

#### **4.2. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2013**

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Utara selama tahun 2005 sampai 2013 tecantum dalam Tabel 2. Dalam Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Sulawesi Utara terkecil berada pada tahun 2005 yaitu 2,12 juta jiwa memiliki angka pertumbuhan sebanyak 1,54%, pada tahun 2009 tercatat jumlah penduduk naik mencapai 2,23 juta jiwa memiliki angka pertumbuhan sebanyak 0,94%.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2013**

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
2005	2,12	1,54
2006	2,16	1,86
2007	2,19	1,21
2008	2,21	0,96
2009	2,23	0,94
2010	2,27	1,87
2011	2,30	1,14
2012	2,32	1,01
2013	2,34	1,01

Sumber : BPS SULUT, 2014

Jumlah penduduk tertinggi tercatat berada pada tahun 2013 hingga mencapai angka 2,34 juta jiwa memiliki angka pertumbuhan sebanyak 1,01% (BPS SULUT, 2014).

#### 4.3. Luas Lahan Pertanian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2013

Perkembangan luas lahan pertanian di Sulawesi Utara selama tahun 2005 sampai 2013 tecantum dalam Tabel 3. Dalam Tabel 3 dapat dilihat bahwa luas lahan pertanian di Sulawesi Utara terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu 1,55 juta hektar memiliki angka pertumbuhan sebanyak 1,94%. Tercatat pada tahun 2010 luas lahan pertanian menjadi 1,52 juta hektar berkurang 0,004% dari tahun 2009. Pada tahun 2011 tercatat luas lahan pertanian berada pada angka 1,54 juta hektar mengalami peningkatan 1,29% dari tahun 2010.

**Tabel 3. Luas Lahan Pertanian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2013**

Tahun	Sawah (Ha)	Non Sawah (Ha)	Luas Lahan Pertanian (Juta Ha)	Pertumbuhan (%)
2005	64.227	1.482.152	1,55	1,94
2006	67.232	1.470.467	1,54	-0,56
2007	64.227	1.463.083	1,53	-0,67
2008	65.629	1.461.698	1,53	0,001
2009	65.638	1.461.689	1,53	0
2010	60.081	1.460.994	1,52	-0,004
2011	61.321	1.479.444	1,54	1,29
2012	60.037	1.403.019	1,46	-5,04
2013	60.019	1.403.035	1,46	-0,0001

Sumber : BPS SULUT, 2014

Sehingga tercatat luas lahan terkecil berada pada tahun 2013 dengan total luas lahan pertanian mencapai 1,46 juta hektar berkurang 0,0001% dari tahun sebelumnya (BPS SULUT, 2014).

#### 4.4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2013

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara selama tahun 2005 sampai 2013 tercantum dalam Tabel 4. pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara terbesar berada pada tahun 2008 yaitu 10,86% penyebab naik drastisnya pertumbuhan ekonomi tahun 2008 dikarenakan antara lain, meningkatnya kinerja ekspor luar negeri khususnya komoditi primer seiring dengan kelanjutan program revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah daerah dan pembangunan berbagai proyek berkaitan dengan persiapan pelaksanaan WOC (World Ocean Conference) pada Tahun 2009 diperkirakan akan turut memberikan andil bagi percepatan pembangunan.

**Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2013**

Pertumbuhan Ekonomi	
Tahun	(%)
2005	5,35
2006	5,72
2007	6,47
2008	10,86
2009	7,85
2010	7,16
2011	7,39
2012	7,86
2013	7,45

Sumber :BPS SULUT, 2014

Pertumbuhan ekonomi terendah tercatat pada tahun 2005 yaitu 5,35% dan pada tahun 2013 tercatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara adalah 7,45% (BPS SULUT, 2014).

#### **4.5. Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2013**

Perkembangan indeks gini di Sulawesi Utara selama tahun 2005

sampai 2013 tecantum dalam Tabel 5. Pada Tabel 5 menunjukan bahwa indeks gini Provinsi Sulawesi Utara tertinggi berada pada tahun 2012 yaitu 0,43. Pada tahun 2005 sampai tahun 2007 indeks gini Provinsi Sulawesi Utara berada diangka yang sama yaitu 0,32 dan indeks gini terendah tercatat ada pada tahun 2008 yaitu 0,28.

**Tabel 5. Indeks Gini Provinsi Sulawesi utara Tahun 2005-2013**

Tahun	Indeks Gini Ratio
2005	0,32
2006	0,32*
2007	0,32
2008	0,28
2009	0,31
2010	0,37
2011	0,39
2012	0,43
2013	0,42

Sumber :BPS SULUT, 2014

Keterangan \* adalah angka perkiraan

Sehingga pada tahun 2013 tercatat indeks gini Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 0,42 dan

masuk dalam kategori tahap relatif sedang(BPS SULUT, 2014).

#### 4.6. Analisis Model Regresi

Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks gini di Sulawesi Utara menggunakan data dari tahun 2005-2013. Model ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \varepsilon_t(3)$$

Nilai-nilai koefisien tersebut akan dimasukan kedalam model sehingga persamaannya berubah menjadi :

$$\hat{Y} = -0.318 + 0.592X_1 - 0.356X_2 - 0.015X_3$$

$\hat{Y}$  adalah indeks gini di Sulawesi Utara,  $X_1$  adalah jumlah penduduk di Sulawesi Utara,  $X_2$  adalah luas lahan pertanian di Sulawesi Utara dan  $X_3$  adalah pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

#### 4.7. Uji Statistik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari model regresi adalah 92,3 % dan koefisien determinasi yang disesuaikan ( $R_{adj}$ ) adalah sebesar 87,8 %. Nilai koefisien sebesar 92,3 % artinya variabel jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan indeks gini di Sulawesi Utara sebesar 92,3 % dan sisanya sebesar 7,7 % dijelaskan oleh variabel (faktor) lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengaruh variabel jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks gini ratio secara serentak diperoleh hasil pengujian nilai signifikan F sebesar 0.003. Sehingga sampai pada taraf nyata  $\alpha > 0,003$  menunjukkan

bahwa diantara variabel jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi paling tidak ada satu yang berpengaruh signifikan terhadap indeks gini.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai signifikan sebesar 0,008 sehingga pada  $\alpha > 0,008$  jumlah penduduk memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks gini di Sulawesi Utara. Variabel luas lahan pertanian memiliki nilai signifikan sebesar 0,315, nilai ini terlalu besar sehingga luas lahan pertanian dapat disimpulkan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks gini di Sulawesi Utara. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan sebesar 0,015 sehingga pada  $\alpha > 0,015$  pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang

nyata terhadap indeks gini di Sulawesi Utara.

#### **4.8. Interpretasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Gini Ratio di Sulawesi Utara**

##### **a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 sehingga pada  $\alpha > 0,008$  jumlah penduduk memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks gini di Sulawesi Utara. Nilai koefisien regresinya adalah 0,592 ini berarti jika jumlah penduduk bertambah sebanyak 1 juta jiwa maka indeks gini akan bertambah sebanyak 0.592 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Populasi penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan

akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar. Hal ini lah berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan. Hasil pengujian sejalan dengan hasil penelitian Fulgsang (2013), dimana peningkatan populasi menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan.

##### **b. Luas Lahan Pertanian**

Luas lahan pertanian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,315. Karena nilai ini terlalu besar maka luas lahan pertanian tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks gini di Sulawesi Utara.

Hasil ini tidak sesuai dengan prediksi, dimana diduga luas lahan pertanian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks gini. Namun hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Schrevel (1989) dalam (Adnyana, 2000), dimana alasan tidak nyatanya

pengaruh luas lahan pertanian adalah semakin dominannya sektor non pertanian.

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 sehingga pada  $\alpha > 0,015$  pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks gini di Sulawesi Utara. Nilai koefisien regresinya adalah -0.015 ini berarti jika pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara bertambah sebanyak 1 % maka indeks gini akan berkurang 0.015 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Ravalion dan Chen (1997) dalam (Waluyo, 2006) menemukan hubungan yang signifikan dan berkorelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan kesenjangan. Hasil riset ini memberikan petunjuk bahwa kenaikan

pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kesenjangan pendapatan, daripada memberikan kontribusi atas kenaikan kesenjangan pendapatan.

Pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi Negara yang sedang berkembang. Pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan oleh peranan sektor pertanian yang dominan. Selanjutnya dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, peranan sektor industri dan jasa semakin besar dan sebaliknya

peranan sektor pertanian menurun (Todaro, 2003).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indeks gini sedangkan luas lahan pertanian tidak berpengaruh secara signifikan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan indeks gini sedangkan penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks gini di Sulawesi Utara.

### 5.2. Saran

Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan penambahan penduduk agar ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks gini dapat menurun.

Adisasmita R, 2005. Pembangunan Ekonomi Perkotaan: Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Adnyana M O, 2000. Assessing the Rural Development Impact of The Crisis in Indonesia. CASER and The World Bank, Bogor.

Astuti D R, 2015. Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013 (Skripsi): Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

BPS SULUT, 2014. Sulawesi Utara Dalam Angka, Manado.

Fulgang S, 2013. Determinants of Income Inequality : Sub-Saharan Perspective, Aarhus.

Glaeser EL. 2006. Inequality. Barry R Weingast BR, Wittman DA, editor. The Oxford Handbook of Political Economy: Oxford University Press Inc. New York.

Hajji, 2010. Pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2002-2008 (Tesis): Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hernanto F, 2003. Ilmu Usahatani, Penebar Swadaya. Jakarta.
- Irawan B, 2005. Konversi Lahan Sawah Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Ketahanan Pangan dan Lingkungan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Jannah M E, 2012. Analisis Keuntungan Usahatani Dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga etani Ubi Kayu Pada Sentra Agroindustri Tapioka Di Kabupaten Lampung Tengah. (Studi kasus di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung), Bandar Lampung.
- Lenggogeni S, 2012. Indeks Harga Pertanian, Nilai Tukar Rupiah Dan Relevansinya Dengan Investasi Sektor Pertanian. Jurnal Ekonomi. Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru. Pekanbaru.
- Murty, 2000. Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Berkelanjutan: P4W Press, Bogor.
- Nasucha C, 2000. Model penilaian properti berbagai penggunaan tanah di Indonesia: Yayasan Bina Ummat Sejahtera, Jakarta.
- Pangemanan L, 2001. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan di Indonesia Dengan Menggunakan Data Tahun 1980-1996 Untuk 26 Provinsi di Indonesia. (tesis) Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Putra D L, 2011. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000–2007 (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rachman H P S, 2002. Struktur dan Distribusi Pendapatan Rumahtangga Petani Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Rahayu S, 2000. Analisa Pemerataan Pendapatan Usahaternak Sapi Perah Rakyat (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya). Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Sumedang.
- Retnosari D, 2006. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat (Skripsi): Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

- Rumagit I, 2014. Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara (Skripsi). Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Sulawesi Utara.
- Sabrina F A, 2011. Kinerja Kelembagaan Agribisnis Tebu: (Studi Kasus di PG Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur), Surabaya.
- Sukirno S, 2006. Makroekonomi Teori Pengantar: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suryono, 2000. Ekonomika Pembangunan, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Supriyati, 2001. Struktur Dan Distribusi Pendapatan Rumah tangga Petani Lahan Sawah Di Jawa Dan Luar Jawa. (Studi Kasus di Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian). Bogor.
- Sutarno, 2003. Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta.
- Tambunan, 2001. Perekonomian Indonesia: Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Tarigan, 2005. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi: PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro M P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_, 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan: Penerbit Erlangga. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi ke 9: Erlangga, Jakarta.
- Waluyo J, 2006. Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta.